

From Sarekat Islam to Sarekat Rakyat: Ideological Shifts and Anti-Colonial Resistance in Early 20th-Century Banyuwangi



Dari Sarekat Islam ke Sarekat Rakyat: Pergeseran Ideologis dan Perlawanan Anti-Kolonial di Banyuwangi Awal Abad ke-20

Moch Sholeh Pratama

 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

 mochsholehpratama@mail.ugm.ac.id

Abstract

In the early 20th century, Sarekat Islam, the largest mass organization in the Dutch East Indies, confronted significant internal challenges due to communist ideological infiltration by the Indonesian Communist Party (PKI), sparking divisions between traditional Islamic factions and radicals, as well as elite conflicts such as those between H.O.S. Tjokroaminoto and Semaun over the political direction of the anti-colonial movement. The study scrutinizes the local transformation in Banyuwangi, East Java—a peripheral region underexplored in national historiography—revealing how regional factors, such as rural economic conditions and labor influences, uniquely modified national movement dynamics. The research method employs a critical-chronological historical approach, analyzing primary sources such as ANRI colonial archives, contemporary newspapers (e.g., *Djawa Tengah* and *Nieuwsbladen op Java*), SI congress documents, and interrogation reports of figures like Aliarcham, supplemented by recent secondary sources for objective validation and narrative reconstruction. Key findings indicate that the shift to Sarekat Rakyat in 1923-1926 was driven by PKI propaganda, resulting in progressive mass actions such as labor strikes at ports and anti-land tax demonstrations in 1926, establishing Banyuwangi as a pioneering resistance hub in East Java with heightened mobilization of native populations against colonial policies like the *Cultuurstelsel*. In conclusion, this ideological shift from Islamic nationalism to radical socialism bolstered local independence struggles and offers valuable insights into the interplay of religion, class, and colonialism in shaping modern Indonesian national identity.

Keywords:

Sarekat Islam, Sarekat Rakyat, Indonesian Communist Party, Anti-Colonial Resistance Banyuwangi, Ideological Shifts Early 20th Century.

Received: 2025-05-30

Revised: 2025-06-27

Accepted: 2025-08-06

*Corresponding Author:

Moch Sholeh Pratama,
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta, Indonesia
mochsholehpratama@mail.ugm.ac.id

© Copyright, 2025 The Author(s). This open-access article is distributed under an [Attribution-Share Alike 4.0 International \(CC BY-SA\)](#).



Pendahuluan

Pada awal abad ke-20, pergerakan anti kolonial semakin masif dilakukan oleh sejumlah organisasi berbasis ideologi di Hindia Belanda. Salah satunya

Sarekat Islam (SI) dengan ideologi gerakan Islam.¹ SI yang didirikan di Surakarta pada 1912 bertujuan untuk memajukan perdagangan bumiputera yang bisa berimplikasi positif terhadap kesejahteraan ekonomi dan meningkatkan pemahaman agama Islam di kalangan bumiputera demi memperbaiki kesalahpahaman tentang agama Islam.² Dalam Kongres Nasional SI Pertama di Bandung pada 1916, Tjokroaminoto berorasi bahwa sudah saatnya rakyat bumiputera diberikan hak membicarakan persoalan tata kelola pemerintahan, SI menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi rakyat perihal beragam peraturan yang merugikan seraya menyodorkan solusi untuk memperbaiki taraf kehidupan rakyat bumi-putera.³ Sejak saat itu, dalam kongres-kongresnya, SI konsisten menyuarakan protes dan aspirasi bumiputera tentang pajak, perkebunan swasta, pelanggaran hak, dan peraturan yang mengekang.⁴

Tatkala SI semakin berkembang secara keorganisasian dan rajutan gagasan persatuan nasional yang kian menguat, SI mulai diguncang isu perpecahan. Elit pengurus pusat SI berkonflik dan dilaporkan oleh surat kabar bahwa komunikasi politik yang tersumbat, perbedaan prinsip keorganisasian dan transparansi keuangan menjadi faktor utama.⁵ Bergabungnya ISDV (*Indische Sociaal Democratische Vereininging*) ke dalam SI pada 1916 turut memperkeruh kondusifitas organisasi. ISDV yang notabene merupakan organisasi berhaluan sosialis-komunis segera menabur doktrin ideologinya kepada anggota-anggota SI, sehingga muncul gerbong kiri di dalam tubuh SI atau yang dikenal SI Merah. Semaoen adalah tokoh sentral SI Merah yang berbasis di Semarang.⁶

Pada 1920, ISDV berubah menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia) dan segera merekrut banyak anggota SI Merah. Pada 1923, PKI dan SI Merah menyelenggarakan kongres bersama di Bandung dan Sukabumi.⁷ Dalam kongres tersebut, Semaoen menyampaikan kritik tajam kepada pimpinan SI yang dinilai terlalu lamban dan lunak terhadap pemerintah kolonial yang kejam. Selain itu, untuk menegaskan perbedaan garis ideologi politik, kongres juga

¹ Takashi Shiraishi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926* (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1997), xi-xii.

² Handri Raharjo. *Metamorfosis Sarekat Islam: Gerakan Politik Islam dan Munculnya Kesadaran Nasional* (Yogyakarta: Media Pressindo, 2019), 55.

³ Anonim. *Sarekat Islam Congres (1e Nationaal Congres) 17-24 Juni 1916 te Bandoeng* (Batavia: Landsdrukkerij, 1916), 2-3.

⁴ Shiraishi, 102.

⁵ "Persoverzicht uit de Maleische bladen". *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie*, 26 Februari 1916.

⁶ Sindhunata. *Ratu Adil: Ramalan Jayabaya dan Sejarah Perlawanan Wong Cilik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024), 224-225.

⁷ Sindhunata, 225.

menyepakati perubahan nama SI Merah menjadi Sarekat Rakyat (SR).⁸ SR pun menjadi sayap organisasi PKI dan memiliki 46 Seksi serta sekitar 31.000 anggota pada 1924.⁹

Dalam konteks kedaerahan, kecamuk di dalam tubuh SI menjalar ke cabang-cabang di daerah, salah satunya di Banyuwangi. Menurut Korver, SI di tingkat pusat selalu berupaya mencapai tujuannya secara damai, tetapi SI di level tempatan cenderung menempuh cara yang tidak damai.¹⁰ Argumen tersebut relevan dengan SI Banyuwangi yang beberapa kali tercatat melaku aksi konfrontatif terhadap pemerintah kolonial. Pada 1918 misalnya, aksi protes massa SI Banyuwangi telah mengakibatkan penutupan dua pabrik gula, yakni Pabrik Gula Rogojampi dan Pabrik Gula Kabat.¹¹ Jejak aksi radikal tersebut kemudian melabuhkan SI Banyuwangi ke gerbong SR yang berhaluan komunis ketika perpecahan SI di pusat terjadi.

Dalam kongres PKI di Yogyakarta pada 1924, kendati silang pendapat elit partai terkait pergerakan revolusi nasional terjadi, akhirnya disepakati akan dilakukan gerakan perlawanan pada 1926.¹² Dalam konteks di Jawa, fakta historis menunjukkan bahwa aksi tidak hanya terjadi di Banten, Surakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Gerakan berbasis ideologi komunis tercatat pernah pecah di Banyuwangi pada 30 April 1926. SR adalah organisasi yang menggawangi gerakan perlawanan tersebut.¹³ Uraian fakta historis di atas menunjukkan bahwa pada 1926 di Banyuwangi pernah terjadi aksi perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda yang di pandegani SR dan berdasarkan titi mangsanya menjadi aksi paling awal di Jawa. Jadi, artikel yang dikerjakan menggunakan metode penelitian sejarah ini, bertujuan untuk menjelaskan secara kronologis transformasi dan aksi SR di Banyuwangi hingga 1926 yang menjadi bagian dari “Pemberontakan Komunis 1926/1927” dalam konteks Jawa dan Sumatera.

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan sejarah kritis-kronologis untuk

⁸ Anonim. *Aliarcham: Sedikit Tentang Riwayat dan Perjuangannya*. (Jakarta: Akademi Ilmu Sosial “Aliarcham”, 1964), 10.

⁹ D.N. Aidit. *Sejarah Gerakan Buruh Indonesia: Dari Tahun 1905 Sampai Tahun 1926* (Jakarta: Jajasan “Pembaruan”, 1952), 56.

¹⁰ A.P.E. Korver. *Gerakan Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?* (Jakarta: Grafitipers, 1985), 129.

¹¹ Anonim. *Sarekat Islam Congres (3e Nationaal Congres) 29 Sept-6 Oct 1918 te Soerabaja* (Batavia: Landsdrukkerij, 1919), 24.

¹² Gerakan ini secara umum disebut sebagai “Pemberontakan Komunis 1926/1927”. D.N. Aidit. *Lahirnja PKI dan Perkembangannya* (Jakarta: Djajasan Pembaruan, 1955), 12-15.

¹³ *Politieke Nota over de Partij Kommunist Indonesia* (Juli 1925-Desember 1926), 24.

merekonstruksi transformasi Sarekat Islam menjadi Sarekat Rakyat di Banyuwangi pada awal abad ke-20, dengan fokus pada analisis sumber primer yang meliputi arsip kolonial dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), surat kabar sezaman seperti *Djawa Tengah* dan *Nieuwsbladen op Java*, dokumen-dokumen kongres Sarekat Islam, serta laporan interogasi tokoh-tokoh kunci seperti Aliarcham dan Semaun, yang memberikan wawasan langsung tentang dinamika ideologis dan aksi massa. Pendekatan ini dikombinasikan dengan sumber sekunder terkini dari historiografi nasional dan internasional untuk melakukan validasi silang, mengidentifikasi bias kolonial dalam sumber primer, serta membangun naratif yang obyektif dan kontekstual sehingga memungkinkan pemahaman mendalam tentang interaksi antara faktor lokal seperti kondisi ekonomi pedesaan Banyuwangi dengan pengaruh nasional dari Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam pergerakan anti-kolonial.

Relevansi metode ini terletak pada kemampuannya untuk menangkap dinamika lokal Banyuwangi sebagai wilayah pinggiran yang sering terabaikan, sehingga selaras dengan objek penelitian yang menyoroti transformasi ideologis dari nasionalisme Islam ke sosialisme radikal. Signifikansi pendekatan kritis-kronologis ini adalah dalam mengungkap peran aksi massa seperti pemogokan buruh dan demonstrasi anti-pajak sebagai katalisator perlawanan pionir, yang memperkaya pemahaman tentang kontribusi regional terhadap gerakan kemerdekaan nasional. Selain itu, metode ini sepenuhnya sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu merekonstruksi naratif historis yang obyektif untuk menjelaskan bagaimana infiltrasi PKI memodifikasi gerakan Sarekat Islam, sehingga memberikan wawasan baru tentang interaksi agama, kelas, dan kolonialisme di Indonesia awal abad ke-20.

Hasil dan Pembahasan: Dari “SI Putih” Ke “SI Merah”

Secara genealogis, Sarekat Islam (SI) merupakan metamorfosis dari Sarekat Dagang Islam (SDI) yang sudah berdiri sejak 1905 berkat inisiasi Samanhoedi Bersama dengan sejumlah koleganya.¹⁴ Samanhoedi yang dikenal sebagai seorang pengusaha batik kaya raya di Kampung Lawean menjadi pemimpin pertama organisasi tersebut.¹⁵ Perubahan nama dari SDI menjadi SI diusulkan

¹⁴ Penyebutan nama organisasi masih simpang siur pada awal pendiriannya. Menurut Shiraishi, nama SDI merupakan penamaan dari orang-orang Surakarta dan sesungguhnya SI secara keorganisasian merujuk kepada Rekso Roemekso yang notabene organisasi ronda bukan perkumpulan dagang. Namun yang pasti, sejak awal organisasi tersebut diberi nama (SI) sebagaimana yang tercantum di anggaran dasar. Menurut Kartodirdjo, SI Surakarta merupakan cabang dari SI Bogor dan bukan SDI. Takashi Shiraishi, 57; Sartono Kartodirdjo (ed). *Sarekat Islam Lokal* (Jakarta: ANRI, 1975), 336.

¹⁵ Korver, 11.

oleh Tjokroaminoto mewakili SI melalui permohonan pengesahan anggaran dasar dan legalitas organisasi kepada pemerintah kolonial pada 14 September 1912.¹⁶ Samanhoedi dikukuhkan sebagai ketua pengurus pusat SI dan didampingi Tjokroaminoto sebagai wakil ketua sekaligus menjabat ketua SI Jawa Timur pada 1913 dalam kongres pertama di Surabaya yang dihadiri sekitar 8000-10.000 anggota SI.¹⁷ Namun, kepemimpinan Samanhoedi secara faktual tidak memberikan dampak yang baik bagi perkembangan SI. Karena laki-laki yang lahir di Desa Sondokoro tersebut dinilai tidak memenuhi kriteria kepemimpinan untuk memimpin suatu organisasi modern dengan basis massa yang besar,¹⁸ sehingga sering kali mendelegasikan tugasnya kepada Tjokroaminoto ketika harus tampil di depan publik dan berhadapan dengan orang-orang Eropa.¹⁹

Dalam kongres SI yang kedua pada 1914 di Yogyakarta, akhirnya Tjokroaminoto dipilih forum untuk menduduki posisi ketua pengurus pusat SI dengan Goenawan sebagai wakil ketua, sedangkan Samanhoedi dijadikan ketua kehormatan.²⁰ Jumlah anggota yang hadir dalam kongres tersebut mencapai 147 delegasi yang mewakili 81 SI tempatan.²¹ Pada tahun ini, total anggota SI berjumlah 444.251 orang,²² sehingga kemudian pemerintah kolonial mengambil keputusan untuk menolak permohonan terkait anggaran dasar dan status hukum SI pusat. Namun, pemerintah kolonial mengakui legalitas terhadap SI di level daerah dan mengizinkan pembentukan suatu badan sentral untuk menjalin koordinasi dengan SI di daerah-daerah serta tidak melarang kegiatan-kegiatan SI.²³ Kebijakan tersebut pada gilirannya menjadi angin segar terhadap pertumbuhan organisasi di daerah-daerah. Dalam kongres ketiga di Surabaya pada 1915, jumlah cabang SI tercatat melonjak menjadi 160 cabang dimana 23 cabang di antaranya berdiri pada tahun tersebut. Total anggota pun bertambah menjadi

¹⁶ Alasan pergantian nama organisasi bertujuan agar secara keanggotaan tidak terbatas dari kalangan pedagang dan tidak sekadar fokus terhadap isu-isu persaingan dan pemajuan perdagangan kalangan bumiputera. Anonim. *Bescheiden Betreffende de Vereeniging "Sarekat Islam"* (Batavia: Landsdrukkerij, 1913), 60. Korver menyebutkan bahwa tindakan ini merupakan indikasi manuver Tjokroaminoto untuk menancapkan pengaruh dan eksistensi di dalam SI demi menggantikan Samanhoedi.

¹⁷ Muljono & Sutrisno Kutoyo. *Haji Samanhudi* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983/1984), 58-61.

¹⁸ Ruth McVey & Semaun. "An Early Account of the Independence Movement." *Indonesia* 1 (1966): 46-75. <https://doi.org/10.2307/3350784>

¹⁹ Korver mengidentifikasi Samanhoedi sebagai pemimpin bercorak tradisional, sedangkan Tjokroaminoto sebagai pemimpin bercorak modern. Perbedaan corak tersebut berkaitan erat dengan riwayat pendidikan keduanya, yakni tidak mengenyam pendidikan dan memperoleh pendidikan Barat. Korver, 233-235.

²⁰ Korver, 232.

²¹ Shiraishi, 98.

²² Korver, 225.

²³ Shiraishi, 94.

490.120 orang.²⁴ Pada tahun ini perjuangan untuk memperoleh legalitas organisasi SI masih terus dilakukan. Tjokroaminoto melakukan audiensi dengan gubernur jenderal yang bertujuan untuk kembali mengajukan permohonan agar SI segera memperoleh status hukum.²⁵

Beberapa bulan berselang, tepatnya pada 18 Maret 1916 pengurus pusat SI memperoleh status hukum dari pemerintah kolonial.²⁶ Perjuangan panjang sejak akhir 1912 akhirnya membuahkan hasil yang menggembirakan sekaligus memupuk spirit soliditas dan perjuangan seluruh keluarga besar SI. Pada 1916 bertempat di Bandung, dilaksanakan kongres keempat secara keorganisasian dan menjadi 'Kongres Nasional SI' pertama pasca memperoleh legalitas dari pemerintah kolonial. Di samping menjalankan kewajiban dengan menjalankan kongres tahunan, kongres kali ini juga ingin menunjukkan semangat persatuan bumiputera.²⁷ Dalam orasi sambutannya, Tjokroaminoto selaku ketua segera membakar semangat delegasi SI dari berbagai daerah dengan mengatakan bahwa sudah saatnya orang-orang bumiputera diberikan hak untuk membicarakan persoalan-persoalan terkait tata kelola pemerintahan. Ditegaskan pula bahwa SI konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi rakyat perihal berbagai peraturan yang merugikan bumiputera seraya menyodorkan solusi untuk memperbaiki taraf kehidupan masyarakat bumiputera.²⁸ Sejak itu, SI dalam kongres-kongresnya secara konsisten menyuarakan protes dan aspirasi bumiputera tentang pajak, perkebunan swasta, pelanggaran hak, dan peraturan yang mengekang.²⁹ Tjokroaminoto tercatat memimpin SI pusat mulai dari 1914 hingga 1917.

Seiring semakin berkembangnya SI secara keorganisasian dan gagasan persatuan nasional yang semakin menguat, SI mulai diguncang isu perpecahan. Timbul konflik diantara elit pengurus pusat SI antara Tjokroaminoto dan Goenawan sebagaimana dilaporkan sebuah surat kabar pada 26 Februari 1916. Berdasarkan sejumlah pandangan yang disampaikan oleh pejabat SI melalui berbagai surat kabar, konflik terjadi karena beberapa faktor, yaitu komunikasi politik yang tersumbat, perbedaan prinsip keorganisasian, dan perihal keuangan.³⁰ Ketidakharmonisan antara elit SI yang kemudian menjalar kepada loyalisnya di bawah telah menjadi preseden buruk bagi soliditas organisasi.

²⁴ Korver, 225.

²⁵ Djoko Marihandono. *H.O.S. Tjokroaminoto: Penyemai Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan*. (Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015), 46.

²⁶ Deliar Noer. *Gerakan Modern di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1980), 116.

²⁷ Shiraishi, 100.

²⁸ *Sarekat Islam Congres*, 2-3.

²⁹ Shiraishi, 102.

³⁰ "Persoeverzicht uit de Maleische Bladen". *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie* tanggal 26 Februari 1916.

Selain itu, bergabungnya *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV) ke dalam tubuh SI pada 1916 turut memperkeruh kondusifitas organisasi pada akhirnya. ISDV diketahui memiliki misi untuk menggaet basis massa SI yang sangat banyak agar turut serta dalam arus gagasan revolusionernya. ISDV yang notabene merupakan organisasi berhaluan sosialis-komunis segera menabur doktrin ideologi kirinya ke dalam anggota-anggota SI, sehingga muncul gerbong kiri di dalam tubuh SI.³¹

Kemunculan gerbong kiri di dalam tubuh SI menandai transformasi organisasi. Periode ini, SI mulai menunjukkan watak revolusioner dan konfrontatif terhadap pemerintah kolonial melalui penunjukan Semaoen dan Darsono sebagai corong propaganda.³² Watak tersebut tampak dalam Kongres Nasional SI kedua di Batavia pada 1917 yang mengemukakan gagasan terkait perlawanan terhadap kapitalisme, sehingga perjuangan ekonomi harus menjadi salah satu prinsip utama dalam penyusunan program kerja SI.³³ Upaya konfrontatif tersebut sangat bertolak belakang dengan cara-cara yang diterapkan Tjokroaminoto sebelumnya yang cenderung kooperatif terhadap pemerintah kolonial dengan menjadi mitra strategis.

Sosok Semaoen memainkan peranan krusial dalam transformasi SI yang semakin konfrontatif dan revolusioner terhadap pemerintah kolonial Belanda. Diketahui bahwa Semaoen sudah aktif di SI sejak 1913 dan menyita perhatian sebagian anggota SI karena sepak terjangnya dalam memobilisasi massa dan serangkaian protes dan pemogokan, sehingga mengantarkannya menduduki jabatan sebagai sekretaris SI pada 1914. Pada 1915 Semaoen bertemu dengan Sneevliet—pendiri ISDV—di Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, Semaoen disebut terkesima dengan sosok Sneevliet yang steril dari mentalitas kolonial Belanda, sehingga mendorongnya untuk bergabung dengan ISDV dan VSTP (*Vereeniging van Spoor en Tramweg Personeel*) seraya tetap aktif di SI. Sejak bergabung dengan organisasi kiri tersebut, spirit anti kolonial Semaoen semakin membara. Semaoen kian tekun belajar menulis, membaca, dan berbicara bahasa Belanda serta intensif berkomunikasi dengan elit-elit ISDV dan VSTP Surabaya.³⁴ Pada 1916, Semaoen hijrah ke Semarang karena ditunjuk sebagai propagandis

³¹ Sindhunata. *Ratu Adil: Ramalan Jayabaya dan Sejarah Perlawanan Wong Cilik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024), 224-225.

³² George McTurnan Kahin. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2013), 100.

³³ Secara spesifik realitas penyerobotan tanah, perbudakan di perdesaan, ketimpangan akses pendidikan, sistem perpajakan yang menindas, paspor dan penegakan hukum yang tidak berkeadilan terhadap bumiputera menjadi bahan bakar untuk menegaskan perlawanan terhadap kapitalisme yang penuh dosa. Lihat Anonim. *Sarekat Islam Congres (2e Nationaal Congres) 20-27 Oct 1917 te Batavia*. (Batavia: Landsdrukkerij, 1919), 3-4.

³⁴ Shiraishi, 134.

VSTP dan komisaris SI Semarang. Puncaknya pada 1917, Semaoen dipilih oleh forum untuk menduduki posisi sebagai ketua SI Semarang – pasca beberapa bulan sebelumnya melakukan debat terbuka dengan Mohammad Jusuf terkait partisipasi SI Semarang dalam komite kebebasan pers yang didukung mayoritas anggota SI Semarang.³⁵

Sejak menduduki pucuk pimpinan tertinggi SI Semarang, Semaoen segera bermanuver secara konfrontatif dan revolusioner terhadap pemerintah kolonial. Misalnya, Semaoen memimpin aksi penolakan terhadap kebijakan milisi bumiputera, *indie weerbaar* (wajib militer), keterlibatan SI dalam *volksraad*, dan serangkaian pemogokan buruh di Semarang.³⁶ Aksi-aksi pemogokan tersebut dalam perkembangannya menjadikan SI Semarang sebagai rujukan atas aksi pemogokan buruh di Batavia, Surabaya, Bandung dan sejumlah daerah lain di Jawa.³⁷ Fenomena tersebut menunjukkan besarnya pengaruh Semaoen di dalam gerbong SI Semarang dan basis massa yang sepakat dengan gagasan revolusionernya. Di era kepemimpinannya, jumlah anggota SI Semarang melonjak pesat dari 700 orang pada 1916 menjadi 22.000 orang pada 1917.³⁸ Pertemuan dengan Sneevliet dan keaktifan di dalam organisasi ISDV dan VSTP serta jiwa muda yang berapi-api pada gilirannya telah mengukuhkan Semaoen sebagai tokoh sentral SI yang berhaluan komunis – SI Merah.³⁹

Dalam Kongres Nasional SI ketiga di Surabaya pada 1918, melalui forum debat terbuka, Semaoen kembali menegaskan sikapnya yang menentang eksistensi milisi bumiputera, *indie weerbaar*, keterlibatan SI dalam *volksraad*, dan mengkritik kian merajalelanya pengusaha Eropa yang menyengsarakan penduduk bumiputera dengan menjadikan mereka sebagai tenaga kerja dengan upah murah.⁴⁰ Dalam forum tersebut, SI pusat akhirnya memutuskan untuk bergabung ke dalam faksi *Radicale Concentratie* di *volksraad* pada 1918 sebagai bentuk kompromi dengan kelompok kiri Semarang pimpinan Semaoen.⁴¹ Keputusan tersebut telah semakin mengikis citra kooperatif sekaligus semakin menegaskan sikap konfrontatif SI terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Sikap konfrontatif dan gagasan revolusioner mulai menunjukkan bentuk nyatanya pada Kongres Nasional Keempat SI di Surabaya pada 1919. Faksi kiri

³⁵ Shiraishi, 135-139.

³⁶ Shiraishi, 139-140.

³⁷ McVey & Semaun, 61.

³⁸ Ruth McVey. *Kemunculan Komunisme Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2017), 23.

³⁹ Sindhunata, 225.

⁴⁰ *Sarekat Islam Congres (3e Nationaal Congres) 29 Sept-6 Oct 1918 te Soerabaja* (Batavia: Landsdrukkerij, 1919), 26-27.

⁴¹ J.T.H. Petrus Blumberger. *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indie* (Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N/V, 1931), 68.

SI yang dipimpin Semaoen kian menunjukkan pengaruh besarnya di dalam forum kongres dengan menempatkan topik urgensi pembentukan organisasi sentral kaum buruh menjadi pembahasan utama di dalamnya.⁴² Topik tersebut didorong untuk dibahas karena realitas kapitalisme kolonial yang telah menjerumuskan rakyat ke dalam jurang penderitaan harus segera dihentikan. Kesejahteraan rakyat bumiputera bak jauh panggang dari api, karena tidak ada upah yang layak, kebutuhan pangan pokok sulit dipenuhi, tidak ada jaminan kesehatan dan pensiunan, sehingga dipandang penting untuk segera membentuk konfederasi serikat buruh sebagai jalan untuk memperbaiki kondisi para buruh dan tani.⁴³ SI pusat pun menyetujui pembentukan konfederasi serikat buruh demi perbaikan nasib buruh dan tani serta segera melakukan sosialisasi secara masif kepada jejaring organisasi buruh terkait arah dan tujuan organisasi tersebut.

Setelah cukup lama beroperasi di dalam tubuh SI dan menggaet simpati sebagian anggotanya, dalam sebuah kongres pada 1920, ISDV mengubah nama menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia).⁴⁴ Menyikapi perubahan tersebut, dalam Kongres Nasional SI kelima pada 1921 di Yogyakarta dilakukan upaya pendisiplinan dengan melarang anggota SI menjadi bagian dari organisasi lain, yang secara spesifik merupakan serangan terhadap orang-orang yang tergabung ke dalam PKI. Namun, upaya pendisiplinan keanggotaan baru berhasil dilakukan dalam Kongres Nasional SI keenam di Surabaya pada 1922. Sejak itu, perpecahan tak terhindarkan di dalam tubuh SI dan tercipta dua blok SI, yakni SI Putih dan SI Merah. Sebagian besar cabang dan anggota SI banyak yang mengikuti gerbong PKI dan bernaung dalam SI Merah.⁴⁵

Pada 1923, PKI dan SI Merah menyelenggarakan kongres bersama di Bandung dan Sukabumi.⁴⁶ Dalam kongres tersebut, lahir salah satu keputusan terkait perubahan nama SI Merah menjadi Sarekat Rakyat (SR) dan mengangkat Aliarcham sebagai ketuanya. Perubahan nama tersebut bertujuan untuk menegaskan perbedaan garis ideologi politik dengan SI Putih.⁴⁷ Sejak saat itu, SR pun menjadi sayap organisasi PKI yang memiliki 46 Seksi serta sekitar 31.000 anggota pada 1924.⁴⁸ Pada prinsipnya, SR menjadi wadah bagi orang-orang progresif dari kalangan borjuis kecil yang siap menjalankan berbagai kebijakan politik PKI.

⁴² *Sarekat Islam Congres (4e Nationaal Congres) 29 Sept-6 Oct 1919 te Soerabaja* (Batavia: Landsdrukkerij, 1919), 3.

⁴³ *Sarekat Islam Congres*, 10-11.

⁴⁴ McVey, 63.

⁴⁵ Lembaga Sedjarah PKI, 42.

⁴⁶ Sindhunata, 225.

⁴⁷ *Sarekat Islam Congres*, 10.

⁴⁸ Aidit, 56.

Selain itu, demi menciptakan gerakan revolusioner, maka dibutuhkan suatu persatuan yang luas dan kuat, sehingga penting untuk melibatkan berbagai elemen bangsa di dalamnya. Oleh karena itu, SR – dan PKI – sangat terbuka terhadap berbagai elemen yang ingin masuk ke dalam Gerbong Merah; lintas kelas sosial, profesi, agama, dan yang terpenting memiliki sikap benci terhadap penindasan pemerintah kolonial Belanda.⁴⁹

Aksi Sarekat Rakyat di Banyuwangi

Sarekat Rakyat (SR) – sebelumnya SI Merah – adalah salah satu organisasi yang sangat berpengaruh di ujung timur Pulau Jawa pada masa pergerakan nasional. Kekuatan pengaruh organisasi ini bisa dilihat dari pertumbuhan kuantitas kadernya. Pada 1926, jumlah anggota Sarekat Rakyat di Banyuwangi yang meliputi Rogojampi, Temuguruh dan Glenmore mengalami peningkatan paling signifikan dibanding daerah-daerah lainnya di Jawa, yakni mencapai 4792 orang.⁵⁰ Jumlah yang sangat banyak tersebut memiliki daya ledak perlawanan yang membahayakan pemerintah kolonial Belanda.

Menurut beberapa laporan, sebelum pecahnya aksi perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, Sarekat Rakyat di Banyuwangi tercatat giat melangsungkan gerakan konsolidasi massa melalui agenda diskusi dan rapat umum. Pada 15 Oktober 1925, diselenggarakan diskusi di Desa Karangsari yang diikuti sekitar 200 orang. Pada hari yang sama, di sekretariat SR di Bedewang juga diselenggarakan rapat umum pengurus dan anggota dengan total kehadiran sekitar 2000 orang.⁵¹ Pada 21 November 1925 dilaksanakan rapat umum yang dihadiri elit-elit SR Banyuwangi dan diikuti sekitar 3000 kader.⁵² Di tempat terpisah, Seksi PKI dan SR Banyuwangi menggelar rapat umum di Desa Tjantoek yang dihadiri sekitar 3.500 orang.⁵³ Menurut Shiraishi, forum publik seperti itu menjadi arena konsolidasi massa bumiputera untuk menyolidkan pasukan sekaligus merumuskan strategi aksi.⁵⁴ Secara umum, diskusi dan rapat umum yang digelar SR Banyuwangi membahas tentang kondisi kekinian rakyat yang berada di jurang kesengsaraan akibat kapitalisme kolonial, doktrin komunisme sebagai ideologi gerakan pembebasan dan berbagai kebijakan pemerintah kolonial yang menyengsarakan, salah satunya penarikan pajak yang dilakukan

⁴⁹ Lin Hongxuan. "Sickle as Crescent: Islam and Communism in the Netherlands East Indies, 1915-1927". *Studi Islamika* 25, no. 2 (2018), 309-350. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i2.5675>

⁵⁰ *Politieke Nota over de Partij Kommunist Indonesia* (Juli 1925-Desember 1926), 24.

⁵¹ *Nieuwsbladen op Java* 31 Oktober 1925, 263.

⁵² *Nieuwsbladen op Java* 5 Desember 1925, 532.

⁵³ *Overzicht van de Inlandsche en Maleisch Chineesche Pers*, 1925, 532.

⁵⁴ Shiraishi, xii.

pada masa krisis ekonomi.

Aktivitas politik SR bukan tanpa gangguan. Nyaris seluruh diskusi dan rapat umum organisasi diawasi secara ketat oleh kepolisian kolonial. Pengawasan ketat kepolisian kian meluas seiring semakin menguatnya gerakan nasionalisme dan komunisme di Hindia Belanda yang menentang legitimasi pemerintah kolonial.⁵⁵ Di Banyuwangi, pada Februari 1926 dilaporkan ada penambahan 70 pasukan kepolisian dengan rincian 20 orang militer, 10 agen polisi lapangan (*veld politie*) dan 40 orang *algemeene agent politie* untuk menjaga keamanan.⁵⁶ Penggunaan instrumen kepolisian tidak hanya untuk membatasi dan melenyapkan kekuatan politik anti kolonial, tetapi juga sebagai parameter pemerintah kolonial terkait aktivitas “politik” yang boleh dilakukan bumiputera.⁵⁷ Oleh karena itu, dalam berbagai aktivitas politik SR, polisi tak jarang melakukan tindakan represif terhadap kader-kader SR yang merencanakan pembangkangan.⁵⁸

Forum-forum konsolidasi SR Banyuwangi merupakan tindak lanjut dari kongres kelima Komintern (Komunis Internasional) sedunia di Moskow pada pertengahan 1924 dan kongres PKI di Yogyakarta pada akhir 1924. Moskow memutuskan terkait krusialnya reorganisasi partai-partai komunis melalui sistem sel (di serikat buruh, pabrik, desa dan permukiman penduduk asli) dan keputusan Yogyakarta yang menginstruksikan untuk meningkatkan intensitas pelatihan kader, propaganda melalui sel-sel dan menggelar pertemuan rahasia. Keputusan dari dua forum tersebut menjadi rujukan SR Banyuwangi melakukan perlawanan terhadap representasi pemerintah kolonial di ujung timur pulau Jawa.⁵⁹

Menurut McVey, sejak 1925 telah muncul aspirasi waktu perlawanan pada 1 Mei 1926 yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional. Tujuannya adalah untuk menyemarakkan hari itu dengan demonstrasi dan pemogokan ekstrem. Mendengar aspirasi tersebut dan langkah taktis antisipatif pemerintah kolonial, pimpinan PKI menginstruksikan kepada seluruh kader dan simpatisannya menahan diri dan meniadakan kegiatan perayaan hari buruh demi mengurangi risiko penangkapan yang bisa mengurangi kekuatan perlawanan.⁶⁰

⁵⁵ Takashi Shiraishi. *Dunia Hantu Digul: Pemolisian sebagai Strategi Politik di Indonesia Masa Kolonial, 1926-1941* (Yogyakarta: Insist Press, 2023), 8.

⁵⁶ “Banjoewangi dapat tambah teman bekerdja 70 orang politie. Terima kasih!”, *Njala*, 11 Februari 1926.

⁵⁷ Shiraishi, 9.

⁵⁸ *Overzicht van de Inlandsche en Maleisch Chineesche Pers*, 1925, 532.

⁵⁹ Shiraishi, 137.

⁶⁰ McVey, 457-458.

Banyuwangi tampaknya menjadi salah satu basis komunis yang mengusulkan agar perlawanan dilakukan pada 1 Mei 1926. Karena pada akhir April, terjadi rentetan kerusuhan di beberapa desa di Banyuwangi. Di Desa Pakis pada 28 April 1926. Perlawanan yang terjadi pada malam hari itu ditangani oleh polisi lapangan dengan mengamankan 40 orang komunis ke penjara. Keesokan harinya, didekat Desa Pakis, yakni Desa Selo juga sempat terjadi kericuhan, tetapi bisa segera diredam polisi lapangan melalui sejumlah tembakan peringatan. Kerusuhan lainnya di Singojuruh menyebabkan sekitar 90 orang komunis ditangkap, di Kampung Bahroe sekitar 15 orang komunis ditangkap,⁶¹ dan di Kampung Wates sekitar 40 orang komunis ditangkap.⁶²

Puncaknya pada 30 April 1926 dilaporkan terjadi perlawanan terhadap pemerintah kolonial di Desa Bedewang⁶³ yang melibatkan seluruh penduduk desa tersebut. Perlawanan itu dilandasi ideologi komunis atau setidaknya di bawah komando orang-orang komunis. Karena diantara 37 orang yang ditahan, tujuh diantaranya adalah pentolan komunis tempatan.⁶⁴ Sumber lain menyebutkan, perlawanan terjadi 1 Mei dan serangan dari 107 penduduk Desa Bedewang telah melukai sejumlah polisi lapangan yang berjaga di desa tersebut serta merusak satu mobil polisi di sana. Seluruh penduduk yang terlibat sempat di tangkap, tetapi 72 diantaranya kemudian dilepaskan, sedangkan pentolan-pentolah gerakan sebagian dipenjarakan dan sebagian lainnya dibuang ke Boven Digoel.⁶⁵

Rentetan aksi kelompok komunis di Banyuwangi dipicu oleh faktor ekonomi. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, rakyat diharuskan membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah kolonial. Di Distrik Rogojampi – tempat Desa Bedewang bernaung – kondisi ekonomi digambarkan sangat memprihatinkan. Rakyat hidup dalam keterbatasan ekonomi ekstrem, meskipun di sana dekat dengan pusat-pusat perekonomian seperti pabrik, perkebunan dan pelabuhan. Namun kesejahteraan ekonomi tampak sangat sulit untuk dijangkau. Para laki-laki berpendapatan sangat rendah, sehingga para perempuan dan anak-anak harus turut bekerja di pabrik-pabrik.⁶⁶ Di tengah kondisi yang sedemikian memprihatinkan, pemerintah kolonial tetap melakukan pemungutan pajak pada akhir April. Pemungutan pajak dilakukan oleh mantri

⁶¹ "Communistische Agitatie. Verzet tegen de Politie", *Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indie*, 08 Mei 1926.

⁶² "Keriboetan di Banjoewangi", *Tjahaja Timoer*, 10 Mei 1926.

⁶³ Bedewang dikenal sebagai basis kader komunis, bahkan sekretariat Sarekat Rakyat berdiri di desa ini.

⁶⁴ "Java en Madoera Extremisme in Oost-Java", *Nieuwe Rotterdamsche Courant* 5 Oktober 1926.

⁶⁵ "Komunisme di Oosthoek", *Pemberita*, 07 September 1926.

⁶⁶ "De Beweging", *Nieuwsbladen op Java*, 09 Januari 1926.

pajak di berbagai distrik di Banyuwangi. Mantri pajak harus lebih memperhatikan rakyat yang berpenghasilan kurang dari Rp. 1200 setahun.⁶⁷ Tampaknya, mantri pajak yang bertugas di Desa Bedewang, Distrik Rogojampi tak mengindahkan instruksi tersebut. Karena selama penarikan pajak banyak rakyat merasa terbebani—mengingat penghasilan mereka yang sedikit—, sehingga menuntut keringanan. Tuntutan tersebut lantas dijawab tembakan peluru peringatan yang sontak menyulut amarah perlawanan rakyat di Bedewang hingga polisi lapangan setempat harus meminta bantuan pasukan dari Malang untuk mengendalikan situasi yang kacau.⁶⁸

Gerakan komunis—terafiliasi Sarekat Rakyat—yang terjadi di beberapa desa di Banyuwangi pada akhirnya mudah dijinakkan oleh kepolisian kolonial. Pemukulan, penangkapan, pemenjaraan, dan pembuangan ke Boven Digoel harus diterima oleh kader-kader komunis (SR-PKI) di Banyuwangi. Hal itu sebagaimana prediksi para pemimpin PKI, pemerintah kolonial sudah mengantisipasi potensi aksi-aksi anarkis pada peringatan Hari Buruh Internasional yang biasanya menyerang representasi pemerintah sebagai sasaran luapan amarah ketidakadilan.

Reaksi Pemerintah Kolonial Belanda

Pemerintah kolonial Belanda memberikan reaksi yang sangat keras terhadap perlawanan bersenjata komunis pada 1926 di Jawa.⁶⁹ Aparat kepolisian diterjunkan ke titik-titik kekacauan yang timbul dari ledakan gerakan perlawanan rakyat anti kolonial. Polisi menjadi ujung tombak untuk mengatasi situasi pelik secara taktis. Menurut Shiraishi, aparat kepolisian pada periode ini memandang PKI dan SR sebagai musuh utama, karena gerbong komunis ini sukses merebut simpati dan menjadi pemimpin gerakan rakyat anti kolonial.⁷⁰ Aparat kepolisian menjadi instrumen pemerintah kolonial untuk menciptakan kondisi yang tertib—steril dari gerakan radikal yang membahayakan legitimasi kolonial. Tindakan represif, pemenjaraan dan pembuangan ke Boven Digoel adalah bentuk reaksi pemerintah kolonial Belanda terhadap aksi-aksi radikal yang dilakukan kelompok komunis di Banyuwangi.

Sejak 1920-an, ketika gerakan nasionalisme dan komunisme menemui momentumnya untuk memobilisasi gerakan rakyat menentang kolonialisme, struktur kepolisian—*Algemeene Recherche Dients*/Dinas Reserse Umum (ARD)-

⁶⁷ "Padjek Boemipoetra", *Tjahaja Timoer*, 12 Mei 1926.

⁶⁸ Lembaga Sedjarah PKI. *Pemberontakan Nasional Pertama di Indonesia (1926)*. (Jakarta: Jajasan "Pembaruan", 1961), 50-51.

⁶⁹ Shiraishi, 133.

⁷⁰ Shiraishi, 108.

Politieke Inlichtingendienst/Dinas Intelejen Politik (PID) terbentuk untuk mengatasi berbagai gejolak politik di daerah-daerah.⁷¹ Dalam konteks ini, polisi diidentikkan dengan urusan politik. Karena setiap ada gejolak politik yang ditimbulkan oleh gerakan rakyat, polisi selalu menjadi garda terdepan yang mengatasi.

Di Banyuwangi, sebelum pecahnya gerakan perlawanan rakyat di Desa Bedewang pada 30 April 1926, aparat kepolisian selalu mengawasi secara ketat aktivitas politik kelompok komunis (SR dan PKI). Beberapa aktivitas pengawasan ketat disertai tindakan represif kepolisian kolonial diberitakan. Pada 15 Oktober 1925, ketika SR menggelar pertemuan di Desa Bedewang dan kehadiran massa yang membludak, alih-alih mengarahkan, polisi justru mengusir para kader yang tidak mendapatkan tempat duduk.⁷² Pada 21 November 1925, ketika PKI dan SR Banyuwangi menggelar rapat umum di Desa Cantuk, terjadi pemukulan yang dilakukan polisi terhadap peserta yang sedang beradu argumen dalam forum.⁷³

Selain itu, setiap orang-orang komunis melakukan perlawanan yang menimbulkan kerusuhan, polisi segera mengendalikan situasi dengan menangkap dan memenjarakannya. Misalnya, sekitar 40 orang komunis dikebloskan ke penjara pasca kerusuhan di Desa Pakis pada 28 April 1926.⁷⁴ Ketika perlawanan pecah di Desa Bedewang, elit PKI dan SR yang meliputi Haji Abbas, Hardjodarsono, Sumukiat, Suprpto, Wikoto, Kyai Sapii, Ibnu, Soewandi, dan Ngadiman Hardjosubroto dipenjarakan, karena telah memimpin gerakan perlawanan yang mengganggu ketertiban umum.⁷⁵ Sementara itu, puluhan orang komunis harus mendekam di balik jeruji besi. Beberapa pentolan SR dari kalangan agamawan bahkan dilaporkan telah dicabut izin mengajarnya, karena terbukti menjadi pemimpin gerakan SR di desanya masing-masing. Soetrijo dari Desa Padang, Singojuruh; Haji Saleh dari Desa Bedewang, Singojuruh, Djadjar alias Boerham dari Desa Pakistadji, Kabat dan Oesin dari Desa Gladag, Rogojampi dilarang menjadi guru agama selama satu tahun. Keempatnya dinilai telah menyimpang dari tujuan awal untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, karena terbukti menyebarkan paham komunis kepada santri-santrinya dan bisa membahayakan keamanan umum.⁷⁶ Upaya kriminalisasi terhadap pemimpin SR juga dilakukan oleh pemerintah kolonial agar rakyat tidak bersimpati

⁷¹ Shiraishi, 94-103.

⁷² *Overzicht van de Inlandsche en Maleisch Chineesche Pers*, 1925, 263.

⁷³ *Overzicht van de Inlandsche en Maleisch Chineesche Pers*, 1925, 532.

⁷⁴ "Communistische Agitatie. Verzet tegen de Politie", *Algemeen handelsblad voor Nederlandsch-Indie*, 08 Mei 1926.

⁷⁵ Lembaga Sedjarah PKI. *Op Cit*, 51.

⁷⁶ "Goeroe-goeroe Igama Communist", *Djawa Tengah*, 13 Januari 1926.

terhadap gerakan kelompok komunis. Asisten Wedono Singojuruh misalnya, menyebarkan berita bohong ke penduduk di lima belas desanya bahwa ketua SR Banyuwangi, Soewandi mencuri sepeda dan telah ditangkap kepolisian. Namun, ketika perjalanan menggunakan kereta api menuju penjara, Soewandi berhasil kabur. Soewandi segera meminta keterangan pejabat yang menyebarkan berita tersebut, tetapi tidak mendapatkan jawaban yang jelas.⁷⁷

Pasca perlawanan bersenjata komunis pada 1926/1927 di Jawa dan Sumatera, pemerintah kolonial membuang elit-elit komunis ke kamp interniran di Boven Digoel yang diterpa malaria. Strategi penginterniran sudah sejak lama diterapkan pemerintah kolonial Belanda untuk mengasingkan tokoh sentral gerakan rakyat, seperti Tjipto Mangoenkoesoemo, Semaoen, Tan Malaka, Samin, dan lain-lain dari basis massa dan daerahnya. Baru pada 1927, seluruh interniran mulai diasingkan ke tempat yang sama, yakni Boven Digoel.⁷⁸ Begitupun elit SR dan PKI yang ditangkap pasca perlawanan di Desa Bedewang, Banyuwangi, Sumukiat, Suprpto, Wikoto, Ibnu, Soewandi, dan Ngadiman Hardjosubroto diasingkan ke Boven Digoel pada 1927.⁷⁹ Sementara itu, dalam monumen di Boven Digoel untuk menghargai jasa para perintis kemerdekaan, tertera juga nama Darman yang disebut berasal dari Banyuwangi turut diasingkan ke sana dan kini makamnya berada di Taman Makam Pahlawan di Boven Digoel.⁸⁰ Di sana, dimakamkan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan yang berasal dari luar Papua.

Kesimpulan

Pada zaman bergerak – meminjam terminologi Takashi Shiraishi – gerakan radikal bumiputera di Jawa sedang mencapai puncaknya. Secara bertubi-tubi, pemerintah kolonial harus menghadapi gerakan nasionalisme dan komunisme bumiputera yang gencar merongrong legitimasi kolonial melalui pemogokan, protes dan gerakan perlawanan yang berujung kerusuhan. Gerakan anti kolonial pada periode awal abad kedua puluh, dikerjakan oleh organisasi-organisasi berbasis ideologi. Salah satunya SI yang didirikan pada 1912 di Surakarta dengan garis ideologi Islam. SI di level pusat senantiasa kooperatif dan memilih jalan damai untuk mencapai tujuannya, tetapi SI di tingkat tempatan kerap kali menggunakan cara-cara konfrontatif dan tidak damai dalam mencapai tujuannya. Di Banyuwangi, SI dilaporkan sering kali melakukan aksi-aksi yang

⁷⁷ "Belemmeringen der Communisten", *Nieuwsbladen op Java*, 09 Januari 1926.

⁷⁸ Takashi Shiraishi. *Loc Cit*, 37-38.

⁷⁹ Lembaga Sedjarah PKI. *Loc Cit*, 51; ANRI. *Bevolking-Register der Geïnterneerden*, 1927; ANRI. *Atschrift Register der Geïnterneerden met gezinnen Boven-Digoel*, 1927.

⁸⁰ Dokumentasi Miftahul Ulum di Monumen Taman Makam Pahlawan di Boven Digoel.

mengganggu ketertiban umum. Misalnya pada 1918, aksi massa SI Banyuwangi yang memperjuangkan hak-hak buruh telah menyebabkan dua pabrik gula tutup.

Dalam perjalanannya, SI mengalami dinamika perpecahan karena infiltrasi ideologi komunis dan perbedaan prinsip politik elit SI yang semakin tajam. Pada 1920, SI terbelah menjadi dua kubu, yakni SI Putih dengan ideologi Islam dan SI Merah dengan ideologi komunis. SI Merah pada 1923 berubah nama menjadi Sarekat Rakyat (SR) untuk menegaskan perbedaan posisi politik dengan SI Putih. Transformasi organisasi secara ideologis tidak hanya terjadi di level pusat, tetapi juga menjalan ke daerah-daerah. Dalam konteks ini, SI Banyuwangi dengan jejak gerakan radikalnya melabuhkan diri ke dalam gerbong SR.

Pasca kongres Komintern di Moskow dan kongres PKI di Yogyakarta pada 1924, gerbong komunis merencanakan gerakan revolusioner untuk mewujudkan kemerdekaan. Instruksi itu segera disambut SR dan PKI di Banyuwangi dengan menggelar serangkaian rapat umum dan diskusi sebagai upaya mengkonsolidasikan basis massa serta memperkuat pemahaman terkait pentingnya melakukan gerakan revolusioner melawan pemerintah kolonial. Rangkaian konsolidasi ini dilakukan sepanjang 1925 hingga awal 1926. Aparat kepolisian (polisi lapangan) nyaris tak pernah absen mengawasi secara ketat agenda-agenda politik SR dan PKI.

Gerakan perlawanan di Banyuwangi dilakukan lebih awal dibandingkan yang terjadi di Jawa secara umum pada November 1926. Di Banyuwangi, gerakan perlawanan sudah masif dilakukan sejak akhir April yang puncaknya terjadi pada 30 April 1926 atau menjelang peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei di Desa Bedewang. Gerakan perlawanan di Desa Bedewang yang notabene menjadi basis utama kader komunis di ujung timur pulau Jawa, disulut penarikan pajak oleh mantri pajak di tengah kondisi ekonomi rakyat yang buruk. Akibat gerakan perlawanan itu, sejumlah polisi luka-luka dan satu mobil polisi rusak dibakar massa. Sementara itu, di pihak bumiputera, puluhan orang ditangkap dan dipenjarakan serta beberapa pentolan SR dan PKI diasingkan ke Boven Digoel pada 1927. Pasca ledakan gerakan perlawanan di Desa Bedewang oleh gerbong komunis, kondisi rakyat tidak banyak yang berubah. Justru tokoh-tokoh komunis dari SR dan PKI harus meringkuk di balik jeruji besi dan bahkan beberapa dibuang ke kamp interniran di Boven Digoel. Kondisi ini cukup menjadi pukulan telak bagi gerakan anti kolonial di ujung timur pulau Jawa, karena banyak tokoh sentral yang tidak bisa lagi beraktivitas memimpin aksi-aksi radikal untuk menentang ketidakadilan pemerintah kolonial Belanda.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Penulis setuju bertanggung jawab atas semua aspek dalam artikel ini.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan.

Referensi

Aidit, Dipa Nusantara. *Lahirnya PKI dan Perkembangannya*. Jakarta: Djajasan Pembaruan, 1955.

Aidit, Dipa Nusantara. *Sejarah Gerakan Buruh Indonesia: Dari Tahun 1905 Sampai Tahun 1926*. Jakarta: Jajasan "Pembaruan", 1952.

Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch-Indië, 8 Mei 1926.

Anonim. *Aliarcham: Sedikit Tentang Riwayat dan Perjuangannya*. Jakarta: Akademi Ilmu Sosial "Aliarcham", 1964.

Anonim. *Bescheiden Betreffende de Vereeniging "Sarekat Islam"*. Batavia: Landsdrukkerij, 1913.

Anonim. *Sarekat Islam Congres (1e Nationaal Congres) 17-24 Juni 1916 te Bandoeng*. Batavia: Landsdrukkerij, 1916.

Anonim. *Sarekat Islam Congres (2e Nationaal Congres) 20-27 Oct 1917 te Batavia*. Batavia: Landsdrukkerij, 1919.

Anonim. *Sarekat Islam Congres (3e Nationaal Congres) 29 Sept-6 Oct 1918 te Soerabaja*. Batavia: Landsdrukkerij, 1919.

Anonim. *Sarekat Islam Congres (4e Nationaal Congres) 29 Sept-6 Oct 1919 te Soerabaja*. Batavia: Landsdrukkerij, 1919.

ANRI. *Atschrift Register der Geinterneerden met Gezinnen Boven-Digoel*. 1927.

ANRI. *Bevolking-Register der Geinterneerden*. 1927.

Blumberger, J. Th. Petrus. *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch-Indië*. Haarlem: H. D. Tjeenk Willink & Zoon N. V., 1931.

DjaWa Tengah, 13 Januari 1926.

Dokumentasi Miftahul Ulum di Monumen Taman Makam Pahlawan di Boven Digoel.

Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, 26 Februari 1916.

- Kahin, George McTurnan. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2013.
- Kartodirdjo, Sartono, ed. *Sarekat Islam Lokal*. Jakarta: ANRI, 1975.
- Korver, A. P. E. *Gerakan Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil?* Jakarta: Grafitipers, 1985.
- Lembaga Sejarah PKI. *Pemberontakan Nasional Pertama di Indonesia (1926)*. Jakarta: Jajasan "Pembaruan", 1961.
- Lin, Hongxuan. "Sickle as Crescent: Islam and Communism in the Netherlands East Indies, 1915–1927." *Studi Islamika* 25, no. 2 (2018): 309–350. <https://doi.org/10.15408/sdi.v25i2.5675>.
- Marihandono, Djoko. *H.O.S. Tjokroaminoto: Penyemai Pergerakan Kebangsaan dan Kemerdekaan*. Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
- McVey, Ruth. *Kemunculan Komunisme Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2017.
- McVey, Ruth, and Semaun. "An Early Account of the Independence Movement." *Indonesia* 1 (1996): 46–75. <https://doi.org/10.2307/3350784>.
- Muljono, M., and Sutrisno Kutoyo. *Haji Samanhudi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983/1984.
- Nieuwe Rotterdamsche Courant*, 5 Oktober 1926.
- Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië*, 26 Februari 1916.
- Nieuwsbladen op Java*, 9 Januari 1926.
- Nieuwsbladen op Java*, 31 Oktober 1925.
- Nieuwsbladen op Java*, 5 Desember 1925.
- Njala*, 11 Februari 1926.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- Overzicht van de Inlandsche en Maleisch-Chineesche Pers*. 1925.
- Pemberita*, 7 September 1926.
- Politieke Nota over de Partij Kommunist Indonesia Juli 1925–Desember 1926.
- Raharjo, Handri. *Metamorfosis Sarekat Islam: Gerakan Politik Islam dan Munculnya Kesadaran Nasional*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2019.

Shiraishi, Takashi. *Dunia Hantu Digul: Pemolisian sebagai Strategi Politik di Indonesia Masa Kolonial, 1926–1941*. Yogyakarta: Insist Press, 2023.

Shiraishi, Takashi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912–1926*. Jakarta: Pustaka Grafiti, 1997.

Sindhunata. *Ratu Adil: Ramalan Jayabaya dan Sejarah Perlawanan Wong Cilik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.

Tjahaja Timoer, 10 Mei 1926.

Tjahaja Timoer, 12 Mei 1926.